

## PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM ISLAM DAN KONSEP POLITIK PROFETIK

**Muh. Rizal Hamdi**

*Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi*

*Email Koresponden: muh.rizalhamdi@gmail.com*

### Abstrak

Persoalan pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hal yang sangat penting dan mendasar dalam kehidupan sosial masyarakat. Kepemimpinan berkaitan dengan hubungan manusiawi (*hablum minannas*). Kepemimpinan merupakan gejala sosial, yang berlangsung sebagai interaksi antarmanusia di dalam kelompoknya, baik kelompok besar atau kelompok kecil. Pergolakan politik Islam dalam hal menentukan pemimpin terjadi ketika Rasulullah meninggal dunia pada tahun 632 M. Umat Islam dihadapkan pada kenyataan untuk menentukan pengganti Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam. Dalam situasi seperti ini maka dipandang sangat perlu diselenggarakannya musyawarah untuk menentukan pemimpin umat. Kepemimpinan profetik merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan, dengan pola yang dilaksanakan nabi (*prophet*). Kekuatan kepemimpinan profetik terletak pada kondisi spiritualitas pemimpin. Artinya, seorang pemimpin profetik adalah seorang yang telah selesai memimpin dirinya. Sehingga, upaya mempengaruhi orang lain, merupakan proses *leading by example* atau memimpin dengan keteladanan.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan normative. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa Dalam ajaran Islam, istilah kepemimpinan dikenal dengan kata *imamah*, sedangkan kata yang terkait dengan kepemimpinan dan berkonotasi pemimpin dalam Islam ada 7 (tujuh) macam, yaitu: khalifah, malik, wali, 'amir, ra'in, sultan, rais, serta ulil 'amri. Politik Propetik terdapat tiga nilai penting yang dijadikan sebagai pijakan atau pijakan yang sekaligus menjadi unsur-unsur yang akan membentuk karakter paradigmatiknya, yaitu; humanisasi, liberasi dan transendensi.

**Kata Kunci:** *Pemilihan, Pemimpin dan Politik Profetik*

Article history: Received :01/09/2023 Approved : 20/09/2023	<b>STIS Darussalam Bermi</b> <a href="https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/mh">https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/mh</a>
---	---

### Pendahuluan

Persoalan pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hal yang sangat penting dan mendasar dalam kehidupan sosial masyarakat.

Kepimpinan berkaitan dengan hubungan manusiawi (*hablum minannas*). Kepemimpinan merupakan gejala sosial, yang berlangsung sebagai interaksi antarmanusia di dalam kelompoknya, baik kelompok besar atau kelompok kecil.<sup>1</sup> Dalam Islam juga mewajibkan umatnya untuk memilih seorang pemimpin dan patuh kepada pemimpin. Firman Allah SWT:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ...<sup>2</sup>

*Ulil amri* merupakan wakil umat Islam yang diberikan amanat untuk menegakkan keadilan yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi orang-orang yang dipimpinnya.<sup>3</sup> Orang-orang yang termasuk ke dalam *ulil amri* adalah para pemegang kekuasaan, para ilmuwan, dan para filosof. Oleh karena itu *ulil amri* terdiri dari dua golongan yaitu ulama dan umara.<sup>4</sup> Dalam konteks kehidupan bernegara, seorang pemimpin sangat diperlukan untuk mengatur, menertibkan, dan membuat kebijakan-kebijakan untuk kepentingan rakyatnya.<sup>5</sup>

#### A. Sejarah Pemilihan Pemimpin Dalam Islam

Dalam ajaran Islam, istilah kepemimpinan dikenal dengan kata *imamah*, sedangkan kata yang terkait dengan kepemimpinan dan berkonotasi pemimpin dalam Islam ada 7 (tujuh) macam, yaitu: khalifah, malik, wali, ‘amir, ra’in, sultan, rais, serta *ulil ‘amri*. Menurut Quraish Shihab, imam dan khalifah adalah dua istilah yang digunakan Al-Qur’an untuk menunjuk pemimpin. Kata *imamah* diambil dari kata *أَمَّ-يَوْمًا-امَامًا-امَامَةً* yang berarti memimpin, pemimpin dan kepemimpinan.<sup>6</sup> Kata *khali>fah* berakar dari kata *خلف*, yang pada mulanya berarti “dibelakang”. Kata *khali>fah*, sering diartikan sebagai “pengganti,” karena yang menggantikan selalu berada di belakang, atau datang sesudah yang

---

<sup>1</sup> Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hlm. 28.

<sup>2</sup> An-Nisa>’ (4): 59.

<sup>3</sup> T.M. Hasbie Al-Shiddieqy, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Islam*, (Yogyakarta: Matahari Masa, 1969), hlm. 7.

<sup>4</sup> Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 168.

<sup>5</sup> Mahmud ‘Abd Al-Majid Al-Khalidi, *Pilar-Pilar Sistem Pemerintahan Islam*, cet. ke-2, (Bogor: Al Azhar Press, 2013), hlm. 406.

<sup>6</sup> Tim Darul Ilmi, *Buku Panduan Lengkap Agama Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Qultum Media, 2010), hlm. 410.

digantikannya selanjutnya. Al-Qur'an menggunakan kedua istilah ini untuk menggambarkan ciri seorang pemimpin ketika berada di depan sebagai panutan, dan ketika dibelakang sebagai seorang pendorong sekaligus mengikuti kehendak dan arah yang dituju oleh yang dipimpinnya.<sup>7</sup>

Pergolakan politik Islam dalam hal menentukan pemimpin terjadi ketika Rasulullah meninggal dunia pada tahun 632 M. Umat Islam dihadapkan pada kenyataan untuk menentukan pengganti Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam. Dalam situasi seperti ini maka dipandang sangat perlu diselenggarakannya musyawarah<sup>8</sup> untuk menentukan pemimpin umat.<sup>9</sup> Dalam pemikiran politik Ibn Taimiyah tidak menegaskan bagaimana mekanisme pengangkatan pemimpin. Menurutnya persoalan mekanisme pemilihan pemimpin tidak terlalu penting, yang lebih utama adalah orang-orang yang mengisi jabatan sebagai pemimpin harus benar-benar amanah dan adil.<sup>10</sup> Berikut ini akan dijelaskan bagaimana sejarah pemilihan pemimpin dalam Islam dari masa Rasulullah, Khulafaurrasidun, dan pasca khulafaurrasidun khususnya pada masa Mua'wiyah dan Yazid.

### 1. Masa Rasulullah S.A.W.,

Setelah hijrahnya Nabi ke *Yastrib* (Madinah) dengan membawa umatnya, menegaskan bahwa Nabi merupakan seorang pemimpin masyarakat. Kemudian Nabi membangun tatanan sosial masyarakat sejahtera di Madinah. Dalam konteks sekarang membangun negara. *Bai'at aqabah* merupakan batu pertama bangunan negara Islam. *Bai'at* tersebut merupakan janji setia beberapa penduduk Madinah sebagai bentuk pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin bagi mereka, bukan hanya sebagai Rasul, sebab pengakuan sebagai Rasulullah tidak melalui *bai'at* tetapi melalui

---

<sup>7</sup> Marzuki Ali, "Nilai-Nilai Kepemimpinan Dalam Ajaran Islam," <http://www.marzukialie.com/upload/arsip/172FATAYAT.pdf>, akses pada 15 Desember 2014.

<sup>8</sup> Menurut sebagian besar Ulama, musyawarah sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok di atas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar baku yang telah ditetapkan oleh *nash-nash* Al-Qur'an dan Hadits. Lihat Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 35.

<sup>9</sup> M. Siddiq Purnomo, dkk., *Sketsa Pemikiran Politik Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Politea Press, 2007), hlm. 69.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

*syahadat*. Dengan adanya *bai'at* ini Rasulullah telah memiliki pendukung yang terbukti sangat berperan dalam tegaknya negara Islam.<sup>11</sup>

Setelah Nabi Muhammad menetap di Madinah beliau mengeluarkan kebijakan dengan membuat sebuah piagam yang mengatur kehidupan dan hubungan antara masyarakat yang ada di Madinah. Karena di Madinah terdiri dari berbagai macam komunitas-komunitas yang berbeda-beda. Piagam inilah yang biasa disebut sebagai *Piagam Madinah*.<sup>12</sup>

Pada masa kepemimpinan Nabi, struktur politik yang diterapkan oleh Nabi masih sangat sederhana. Nabi memegang otoritas sebagai Rasul, Pemimpin negara, dan sekaligus sebagai hakim. Ketika beliau akan mengambil keputusan, ada kalanya beliau berkonsultasi dengan para sahabat senior yang merupakan *ahlul halli wal aqdi*, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangannya. Ada kalanya ia tidak berkonsultasi dan ada kalanya beliau dituntun oleh wahyu sebagai solusi terhadap masalah tertentu.<sup>13</sup>

Rasulullah sebagai kepala negara tidak pernah menjelaskan secara terperinci mekanisme pemerintahan. Ia juga tidak pernah berusaha untuk merombak total sistem kekuasaan suku-suku arab yang telah ada sebelum Islam datang. Misalnya daerah pedalaman ditandai dengan kepemimpinan absolut kepala suku dan kepatuhan seluruh anggotanya. Sistem ini jelas tidak bisa diterapkan di daerah perkotaan.<sup>14</sup> Artinya mekanisme pemilihan pemimpin disesuaikan dengan keadaan sosial masyarakat yang berlaku.

## 2. Masa *Khulafaurrasydu>n*

Permasalahan politik yang pertama kali muncul setelah meninggalnya Rasulullah adalah siapakah yang akan menggantikan beliau sebagai kepala pemerintahan dan bagaimana pelaksanaan sistem pemerinthannya. Karena masalah tersebut diserahkan kepada Rasulullah

---

<sup>11</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, cet. ke-1, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990), hlm. 9.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>13</sup> Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 97.

<sup>14</sup> *Ibid.*

hanya meninggalkan suatu prinsip dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di kalangan umat Islam yaitu prinsip musyawarah.<sup>15</sup> Konsensus para sahabat yang berkaitan dengan keharusan untuk menentukan pengganti Nabi sebagai pemimpin umat Islam secara substansial merupakan salah satu cara untuk mempertahankan sistem yang telah dibuat sebelumnya oleh Nabi Muhammad ketika membangun negara Madinah.

### 1) Khalifah Abu Bakar

Setelah meninggalnya Rasulullah Saw., sebagian umat Islam menyibukkan diri untuk mencari siapa yang akan menjadi pemimpin umat sepeninggal Rasulullah saw., karena beliau tidak mewasiatkan bagaimana dan siapa yang akan menjadi pemimpin setelah beliau wafat.<sup>16</sup> Umat Islam dihadapkan pada krisis kepemimpinan seperti keteladanan kepemimpinan baru bagi umat manusia, prinsip-prinsip kepemimpinan, dan kriteria kepemimpinan. Masyarakat Tsaqifahlah yang merasakan perlunya penyatuan kepemimpinan umat Islam di bawah satu komando.<sup>17</sup>

Pada saat kaum *muhajirin* dan *anshar* bermusyawarah tentang pengganti kepemimpinan Nabi, namun tidak ada kesepakatan diantara mereka.<sup>18</sup> Abu Bakar yang hadir pada waktu itu menyampaikan pidatonya mengatakan bahwa yang berhak menjadi pemimpin umat Islam adalah dari kalangan Quraisy,<sup>19</sup> karena orang arab tidak akan tunduk kecuali pada suku Quraisy, artinya suku yang bisa memimpin mereka adalah suku Quraisy. Dengan demikian, pertimbangan

---

<sup>15</sup> Dudung Abdurrahman, dkk., *Sejarah Peradaban Islam: Dari Masa Klasik Hingga Modern*, cet. ke-4, (Yogyakarta: LESFI, 2012), hlm. 45.

<sup>16</sup> Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), hlm. 396.

<sup>17</sup> Khairudin Yujah Sawiy, *Perebutan Kekuasaan Khalifah (Mengungkap Dinamika dan Sejarah Politik Kaum Sunni)*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2005), hlm.2.

<sup>18</sup> Husyn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, cet. ke-1, (Bandung: PT Rosdakarya, 1995), hlm. 9.

<sup>19</sup> Munawir Sjadzali, *Islam.*, hlm. 22.

kekuatanlah yang mampu menyelesaikan perdebatan masalah kepemimpinan ini.<sup>20</sup>

## 2) Umar bin Khattab

Dari beberapa literatur sejarah menyebutkan ada dua versi tentang pengangkatan Umar sebagai Khalifah pengganti Abu Bakar. Pendapat pertama mengatakan bahwa sebelum Abu Bakar Meninggal dia bermusyawarah dengan berapa sahabatnya untuk menunjuk Umar sebagai penerus kekhalifahan Abu Bakar.<sup>21</sup> Diantara sahabat yang diajak bermusyawarah tersebut adalah Abdurrahman bin Auf, Usman Bin Affan, Said bin Zaid bin Naufal.<sup>22</sup>

Pendapat kedua menjelaskan bahwa menjelang Abu Bakar wafat, beliau mewasiatkan agar Umar diangkat sebagai pengganti kekhalifahannya. Hal ini bertujuan supaya tidak terjadi lagi perpecahan dan kekacauan di kalangan umat Islam, sebagaimana yang terjadi sepeninggal Rasulullah.<sup>23</sup>

## 3) Utsman bin Affan

Pada tahun 644 M Umar ditikam oleh seorang budak Persia bernama Pirouz Nahavandi (Abu Lu'luah) dan wafat dua hari kemudian.<sup>24</sup> Pengangkatan Utsman sebagai Khalifah pengganti Abu Umar sebagai penerus kepemimpinannya dilakukan dengan cara bai'at. Utsman Bin 'Affan terpilih menjadi khalifah ketiga berdasarkan suara mayoritas dalam musyawarah tim formatur yang anggotanya dipilih oleh

---

<sup>20</sup> Muhammad 'Abid al-Jabiri, *Ad-Di>n Wa ad-Daulah Wa Tahbi>q asy-Syari>'ah*, terj. Mujiburrahman, cet. ke-1, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), hlm. 65.

<sup>21</sup> Kebijakan Abu Bakar tersebut ternyata diterima oleh masyarakat kemudian bersama-sama membai'at Umar. Umar menyebut dirinya sebagai *Khali>fah Khali>fati Rasulillah* (pengganti dari pengganti Rasulullah). Kemudian ia juga memperkenalkan istilah *Ami>r al-Mu'mini>n*. Lihat Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, cet. Ke-10, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 37.

<sup>22</sup> Haidar Barong, *Umar Bin Khattab Dalam Perbincangan (Penafsiran Baru)*, cet. ke-1, (Jakarta: Yayasan Cipta Persada Indonesia, 1994), hlm. 244.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 245. Lihat juga Imam As-Suyuthi, *Tharikh Al-Khulafa>'* (*Ensiklopedi Pemimpin Umat Islam dari Abu Bakar Hingga Mutawakkil*), cet. ke-1, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), hlm. 132.

<sup>24</sup> Raana Bokhari dan Mohammad Seddon, *Ensiklopedia Islam*, (ttp: tnp, tt), hlm. 61.

Khalifah Umar Bin Khatthab menjelang wafatnya.<sup>25</sup> Sebelum Ustaman dipilih, ada tiga calon yang akan menggantikn Umar yaitu Abdurrahman bin ‘Auf, Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Namun ketika Abdurrahman ditugaskan untuk memilih antara Ali dan Utsman, dia berkata kepada Ali, jika dia terpilih sebagai khalifah, maka berlaku Adillah, dan jika Utsman yang terpilih maka taatlah kepada Utsman. Peristiwa inilah yang menjadi awal dibai’atnya Utsman sebagai khalifah pengganti Umar berdasarkan konsensus para sahabat.<sup>26</sup>

#### 4) Ali bin Abu Thalib

Terdapat perbedaan pendapat antara pemilihan Abu bakar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Ketika kedua pemilihan Khalifah terdahulu (Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Ustman ibn Affan), terdapat beberapa orang yang menentangnya, tetapi setelah calon terpilih dan diputuskan menjadi Khalifah, semua orang menerimanya dan ikut berbaiat serta menyatakan kesetiaannya.<sup>27</sup>

Namun lain halnya ketika pemilihannya Ali bin Abi Thalib, justru sebaliknya. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, masyarakat beramai-ramai datang dan membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah.<sup>28</sup> Beliau diangkat melalui pemilihan dan pertemuan terbuka sehingga Ali terpilih secara aklamasi.<sup>29</sup> Akan tetapi suasana pada saat itu

---

<sup>25</sup> Nadirsah Hawari, “Mencermati Isu Nepotisme Kepemimpinan Utsman Bin ‘Affan,” dalam *Jurnal TAPIS*, Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, Vol.8 No.1, (Tahun 2012), hlm. 45

<sup>26</sup> Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, cet. ke-1, (Jakarta: Gozian Press, 2013), hlm. 110.

<sup>27</sup> Muhlis, “Islam Masa Khulafaur Rasyidin,” <http://muhlis.files.wordpress.com/2007/08/islam-masa-khulafaur-raosyidin.pdf>, akses 14 Desember 2014.

<sup>28</sup> Ada juga yang menyebutkan bahwa Ali dibaiat menjadi khalifah oleh para pembangkang yang menguasai Madinah. Pengangkatan tersebut dilaksanakan dalam suasana yang masih kacau akibat terbunuhnya Utsman bin Affan. Ketika itu, ibu kota sepenuhnya di bawah kendali para pemberontak, sehingga dengan leluasa mereka dapat memaksakan kehendaknya kepada siapa saja, termasuk desakan kepda Ali untuk menerima jabatan khalifah dan mengintervensi masyarakat agar memberikan baiat kepada Ali. Sehingga pada waktu itu ada beberapa sahabat yang tidak sepenuh hati memberikan baiatnya kepada Ali, seperti Zubair bin Awwam, Talhah bin Ubaidillah, dan lainnya. Taufik Abdullah, dkk., *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, (Khilafah)*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 57.

<sup>29</sup> Tim Darul Ilmi, *Buku*, hlm. 444.

sedang kacau, karena hanya ada beberapa tokoh senior masyarakat Islam yang tinggal di Madinah. Pada awalnya Ali tidak ingin menjadi khalifah pengganti Ustman karena pergolakan sosial politik yang terjadi pada waktu itu. akan tetapi dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan umat Islam, akhirnya dia setuju untuk menerima tanggungjawab sebagai khalifah.<sup>30</sup> Meskipun keabsahan pengangkatan Ali bin Abi Thalib ditolak oleh sebagian masyarakat termasuk Mu'awiyah bin Abi Sufyan.

Meskipun hal itu terjadi, Ali masih menjadi Khalifah dalam pemerintahan Islam. Pro dan kontra terhadap pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah masih terjadi. Beberapa kelompok masyarakat tidak suka kepada Ali seperti keluarga Mu'awiyah.<sup>31</sup>

### **3. Pasca *Khulafaurrasydu>n* (Mu'awiyah dan Yazid)**

Pasca runtuhnya rezim *khi>lafah rasyidah* terjadi perubahan mendasar yang pertama kali terjadi ialah dalam pokok undang-undang yang mengatur tentang cara pengangkatan seorang pemimpin umum. Kaidah yang diikuti adalah tidak dibenarkannya daya-upaya seseorang untuk dapat menduduki jabatan khalifah atau meraih kekuasaan dengan usaha dan rencananya sendiri. Rakyatlah yang meletakkan kendali pemerintahan, setelah melakukan musyawarah untuk menentukan orang yang berhak memegang kendali kekuasaan. Oleh sebab itu maka *bai'at* yang diberikan oleh rakyat kepada seseorang sama sekali bukan merupakan akibat adanya kekuasaan, tetapi *bai'at* justru merupakan pemberian kekuasaan. Sehingga seseorang tidak akan menjadi penguasa sebelum adanya *bai'at* dari rakyat yang dilakukan secara sukarela dan bebas.

#### **1) Mu'awiyah bin Abu Sufyan**

Ketika rezim Bani Umayyah berkuasa terjadi “pertentangan” antara kaidah pengangkatan pemimpin pada masa rezim *khi>lafah*

---

<sup>30</sup> Syed Mahmudunnasir, *Islam, Konsepsi dan Sejarah*, cet. ke-4, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 165.

<sup>31</sup> Abbas Mahmud Aqqad, *Keagungan Ali bin Abu Thalib*, cet.ke-3, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994), hlm. 65.

*rasyidah* dan rezim Bani Umayyah. Perubahan itu terjadi ketika pengangkatan Mu'awiyah sebagai khalifah. Mu'awiyah memiliki ambisi yang kuat untuk menjadi seorang khalifah sehingga dia bisa saja menggunakan cara apapun untuk memperoleh kekuasaan khalifah. Peperangan tidak bisa terhindarkan lagi ketika ambisinya sebagai khalifah tidak bisa terbendung. Selain itu ketika Mu'awiyah berhasil menjabat sebagai khalifah, tidak ada lagi proses musyawarah seperti yang dipraktekkan pada zaman Rasulullah Saw., dan *Khulafaurrasyidu>n*. Melainkan ia telah menjadi pemimpin dengan menggunakan pedang dan kekuatannya.<sup>32</sup> Ketika rakyat banyak melihat bahwa Mu'awiyah sebagai khalifah atas mereka secara *bilfi'li (de facto)*, tidak ada lagi pilihan lain bagi mereka kecuali memberikan *bai'atnya* kepada Mu'awiyah. Kalau tidak justru akan terjadi kekacauan dan pertumpahan darah yang berkepanjangan.

Kekacauan seperti ini tentunya tidak dapat diutamakan atas ketertiban dan keamanan. Oleh sebab itu para sahabat dan *tabi'in* sepakat untuk memberikan *bai'atnya* kepada Mu'awiyah setelah pengunduran diri Hasan bin Ali r.a dari jabatan khalifah pada tahun 41 Hijriyah. Maka dinamakan dengan '*amul-Jama>'ah* atau tahun penyatuan seluruh umat, berdasarkan berhentinya perang di antara rakyat dalam negeri.<sup>33</sup>

## 2) Yazid bin Mu'awiyah

Umat Islam pada umumnya cenderung untuk menyalahkan Mu'awiyah atas berakhirnya tradisi pengisian jabatan kepala negara melalui musyawarah, karena Mu'awiyah menjadi khalifah tidak melalui prosedur musyawarah, bahkan merebutnya dengan kekerasan, tipu daya dan kelicikan. Dia pula yang merintis sistem monarki atau kerajaan dengan

---

<sup>32</sup> Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*, cet. ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 291.

<sup>33</sup> Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan (Konsep Pemerintahan Islam serta Studi Kritis "Kerajaan" Bani Umayyah dan Bani Abbas)*, cet. ke-1, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 186.

kepala negara turun temurun.<sup>34</sup> Ide awal pewarisan khalifah dimunculkan oleh al-Mughirab bin Syu'bah yang menjabat sebagai Gubernur di Kuffah ketika Mu'awiyah menjadi khalifah. Dia yang menyarankan Mu'awiyah untuk mengangkat Yazid sebagai penggantinya. Apapun alasannya, fakta sejarah menyatakan bahwa Mu'awiyah telah mewariskan kekhalifahannya kepada Yazid, anaknya, karena itu dia telah membuat suatu tradisi baru yang mengubah karakter sistem pemerintahan dalam Islam. Sistem warisan telah menggantikan sistem permusyawaratan. Alasannya adalah Mu'awiyah dan orang-orang yang memberinya ide itu khawatir, akan terjadinya fitnah dan pertentangan yang bersakibat pada terjadinya pertumpahan darah sebagaimana yang terjadi sejak khalifah Ustman berkuas. Mu'awiyah menerangkan dalam beberapa kesempatan bahwa sesungguhnya ia tidak tenang meninggalkan umat Muhammad setelah dia wafat seperti domba tanpa pengembal. Itu merupakan alasan-alasan yang dapat diterima akal.

Akan tetapi yang dikritik pada Mu'awiyah adalah, dia tidak memilih orang terbaik dari umat Islam dan paling cakap yang ditunjuk memegang tampuk kekhalifahan setelah terlebih dahulu meminta nasehat masyarakat dan mendapat persetujuan dari masyarakat. Pewarisan kepada anak sendiri juga tidak akan luput walau dengan adanya sebab-sebab lainnya. Oleh karena itu, kita tidak dapat menjustifikasikan tindakan Mu'awiyah dengan alasan kecintaan kepada putranya dan mengutamakan keluarga untuk tetap mempertahankan kekuasaan agar tetap berada di dalam lingkungan keluarganya. Dan ini tidak lain merupakan sistem pewarisan atau kerajaan (Monarki).

Dengan melihatnya secara obyektif, layak untuk disebutkan bahwa faktor perubahan zaman dan konsisi sosial masyarakat pada waktu itu juga mempengaruhi perubahan sistem pemilihan khalifah. Ketika masa khulafaur rasyidun berkuasa masyarakat Islam terbatas pada kota Madinah, dan jumlah

---

<sup>34</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, edisi ke-5 (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993), hlm. 35.

masyarakat Islam masih sedikit, sehingga masih mungkin mengumpulkan seluruh masyarakat dan meminta pendapat mereka. Masyarakat Islam pada waktu itu juga masih banyak yang bertaqwa dan *wara'* karena faktor tempat tinggal mereka (yang notabene adalah kota Rasul). Masih mudah bagi Masyarakat Islam untuk bermuafakat.

Akan tetapi, keadaan tersebut telah berubah dan kaum muslimin sudah berpencar ke kota besar, maraknya kristalisasi kelompok, juga makin beragamnya mazhab berikut aliran-aliran serta timbulnya semangat panatisme, sangat sulit bagi masyarakat untuk berkumpul dan bermusyawarah pada satu perkara atau individu tertentu untuk membuat sistem *syura* atau sistem pemilihan dan pembaiatan umum dari tiap individu. Pada waktu itu juga umat Islam belum mencapai taraf yang membuat mereka mampu meletakkan konstitusi yang tetap dan memiliki kaidah-kaidah yang definitif, diketahui publik, dan memperoleh komitmen dari semua lapisan masyarakat, serta mampu membuat sebuah lembaga permanen untuk pencalonan khlifah, disertai suatu sistem administrasi yang kapabel yang mampu melaksanakan pemilihan umum sebagaimana yang dilakukan pada bangsa-bangsa modern. Oleh karena itu, semua bangsa ketika itu mengikuti sistem pewarisan sebagai luapan rasa khawatir atas terjadinya kekacauan dan fitnah, serta timbulnya permusuhan dan peperangan, juga demi mencapai stabilitas. Kondisi seperti itu memaksa umat Islam untuk bersandar pada sistem pewarisan.

Itu merupakan penafsiran seajaarah tentang perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan Islam. Eseni penafsiran itu adalah bahwa kondisi yang ada menuntut atau memaksa untuk mewariskan kekhalifahan, tetapi ide atau sistem yang idealis pada waktu yang sama harus tetap terbayang dalam benak pikiran, dan harus tetap dipertahankan dalam kapasitasnya sebagai sistem pemerintahan Islam ideal sesungguhnya.<sup>35</sup>

## **B. Politik Profetik**

### **1. Pengertian politik Profetik**

---

<sup>35</sup> M. Dhiaduddin Rais, *Teori*, hlm. 145.

Istilah profetik merupakan derivasi dari kata *prophet*. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, profetik artinya bersifat kenabian. Istilah profetik ini pertama kali dipopulerkan oleh Kuntowijoyo. Dimana pemikiran tentang profetik diilhami oleh Muhammad Iqbal. Iqbal mendeskripsikan bahwa setelah nabi Muhammad Saw., *mi'raj*, beliau tetap kembali ke bumi menemui masyarakat dan memberdayakannya. Seandainya Nabi adalah seorang sufi, maka Nabi tidak akan kembali lagi ke dunia menemui pengikutnya, karena Dia sudah merasakan nikmat kebahagiaan bertemu dengan Tuhan.<sup>36</sup>

Kepemimpinan profetik merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan, dengan pola yang dilaksanakan nabi (*prophet*). Kekuatan kepemimpinan profetik terletak pada kondisi spiritualitas pemimpin. Artinya, seorang pemimpin profetik adalah seorang yang telah selesai memimpin dirinya.<sup>37</sup> Sehingga, upaya mempengaruhi orang lain, merupakan proses *leading by example* atau memimpin dengan keteladanan.

## 2. Nilai-Nilai Politik Profetik

Dalam kajian ilmu Politik Propetik terdapat tiga nilai penting yang dijadikan sebagai pijakan atau pijakan yang sekaligus menjadi unsur-unsur yang akan membentuk karakter paradigmatiknya, yaitu; humanisasi, liberasi dan transendensi,<sup>38</sup>

### a. Humanisasi

Humanisme lahir pada awal abad ke-16, bersamaan dengan lahirnya reformasi di dunia Kristen. Kebangkitan humanisme yang paling awal ditandai dengan lahirnya gagasan mengenai kebebasan manusia untuk menentukan nasibnya sendiri. Gerakan humanisme mempercayai

---

<sup>36</sup> Irhamni H. Rofi'un, Membumikan Kepemimpinan Profetik, <http://irhamnirofiun.blogspot.com/2014/04/membumikan-kepemimpinan-profetik.html>, akses 10 Desember 2014.

<sup>37</sup> Sanerya Hendrawan, *Spiritual Management: From Personal Enlightenment Towards God Corporate Governance*, (Bandung: Mizan, 2009), hlm. 158.

<sup>38</sup> Muhammad Nur, "Rekonstruksi," hlm. 21.

kemampuan manusia, hasrat intelektual, dan penghargaan akan disiplin intelektual.

Pada awalnya, humanisme hanya berkembang di Italia, tetapi lama-kelamaan gerakan ini berkembang di Jerman, Prancis dan negara-negara Eropa lainnya. Bahkan humanisme sebagai sebuah filosofi juga merasuki dimensi keilmuan. Namun ketika humanisme behadapan dengan agama, banyak kalangan menilai bahwa humanisme akan mengganggu stabilitas agama. Ada yang menganggap bahwa humanisme menekankan pada individu rasional sebagai nilai paling tinggi dan sumber nilai terakhir tanpa harus terikat kepada ajaran agama.<sup>39</sup>

Paradigma humanisasi artinya memanusiakan manusia. Dalam pandangan Islam, humanisasi harus dipahami sebagai suatu konsep dasar kemanusiaan yang tidak berdiri dalam posisi bebas. Ini mengandung pengertian bahwa makna atau penjabaran arti “memanusiakan manusia” itu harus selalu terkait secara teologis.<sup>40</sup>

Menurut Muhammad Arkoun humanisme Islam memiliki tiga tipologi yaitu; *Pertama*, humanisme literer (abad III-IV/IX-X), Arkoun menggambarkan humanisme ini sebagai semangat aristokrasi, uang dan kekuasaan. Pada masa itu orang-orang yang berbakat tidak bisa mengerjakan apa yang menjadi bakatnya kecuali mereka berada di dalam lingkungan istana raja-raja dan di lingkungan orang kaya. Gambaran ideal humanitas seperti ini terjadi di Barat abad XVI. Humanisme literer pada waktu itu mirip dengan adab atau humanitas yaitu sebagai sebuah pengetahuan dan kebudayaan yang komplit, semangat dan gambaran ideal manusia tidak dibatasi oleh disiplin keilmuan. *Kedua*, humanisme religius merupakan sebuah konsepsi yang hendak mengukur ketaatan keberagamaan atau kesalehan seseorang lewat dunia mistik (tasawuf). *Ketiga*, humanisme filosofis digambarkan Muhammad Arkoun sebagai menyatunya elemen-elemen dari humanisme literer dan humanisme

---

<sup>39</sup> Hasan Hanafi, dkk., *Islam dan Humanisme (Aktualisasi Humanisme Islam di Tengah Krisis Humanisme Universal)*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. vii.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. Xi.

religius, tanpa dibedakan oleh disiplin keilmuan yang jelas dan lebih solider terhadap kebenaran antara dunia, manusia, dan Tuhan.<sup>41</sup>

Politik propetik mengusulkan humanisme teosentris sebagai ganti humanisme antroposentris untuk mengangkat kembali martabat manusia. Dengan konsep ini, manusia harus memusatkan diri pada Tuhan, tapi tujuannya adalah untuk kepentingan manusia (kemanusiaan) sendiri. Perkembangan peradaban manusia tidak lagi diukur dengan rasionalitas tapi transendensi. Humanisasi diperlukan karena masyarakat sedang berada dalam tiga keadaan akut yaitu dehumanisasi (obyektivasi teknologis, ekonomis, budaya dan negara), agresivitas (agresivitas kolektif dan kriminalitas) dan loneliness (privatisasi, individuasi).<sup>42</sup>

#### **b. Liberasi**

Liberasi adalah pembebasan dari kekejaman kemiskinan struktural, keangkuhan teknologi, dan pemerasan kelimpahan.<sup>43</sup> Liberasi dalam Ilmu politik profetik sejalan dengan prinsip sosialisme (marxisme, komunisme, teori ketergantungan, teologi pembebasan). Hanya saja Ilmu politik profetik tidak hendak menjadikan liberasinya sebagai ideologi sebagaimana komunisme. Liberasi Ilmu politik profetik adalah dalam konteks ilmu, yaitu ilmu yang didasari pada nilai-nilai luhur transendental dan membebaskan dari nilai-nilai material. Jika nilai-nilai liberatif dalam teologi pembebasan dipahami dalam konteks ajaran teologis, maka nilai-nilai liberatif dalam politik profetik dipahami dan didudukkan dalam konteks ilmu sosial yang memiliki tanggung jawab profetik untuk membebaskan manusia dari kekejaman kemiskinan, pemerasan kelimpahan, dominasi struktur yang menindas dan hegemoni kesadaran palsu.

Sasaran liberasi ada pada realitas empiris, sehingga liberasi

---

<sup>41</sup> Baedhowi, *Humanisme Islam (Kajian Terhadap Pemikiran Filosofis Muhammad Arkoun)*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 66-79.

<sup>42</sup> Muhammad Nur, "Rekonstruksi.," hlm. 22.

<sup>43</sup> Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu (Epistemologi, Metodologi, dan Etika)*, edisi kedua, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 88.

sangat peka dengan persoalan penindasan atau dominasi struktural. Fenomena kemiskinan yang lahir dari ketimpangan ekonomi adalah bagian penting dari proyek liberasi. Liberasi menempatkan diri bukan pada lapangan moralitas kemanusiaan abstrak, tapi pada realitas kemanusiaan empiris, bersifat kongkrit. Sikap menghindar dari yang kongkrit menuju abstrak adalah salah satu ciri berpikir berdasarkan mitos.

Ilmu politik profetik menggariskan empat sasaran liberasi, yaitu sistem pengetahuan, sistem sosial, sistem ekonomi dan sistem politik yang membelenggu manusia sehingga tidak dapat mengaktualisasikan dirinya sebagai makhluk yang merdeka dan mulia.

Liberasi sistem pengetahuan adalah usaha-usaha untuk membebaskan manusia dari belenggu sistem pengetahuan yang materialistik. Liberasi sistem sosial dalam konteks perubahan besar yang terjadi pada masyarakat Indonesia yang sedang keluar dari sistem agraris menuju sistem industrial. Liberasi sistem ekonomi berarti membebaskan manusia dari sistem ekonomi yang justru menghasilkan kesenjangan dan memproduksi kemiskinan. Liberasi politik berarti membebaskan sistem dari otoritarianisme, diktator, dan neofeodalisme. Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani<sup>44</sup> merupakan tujuan Islam.

### c. Transendensi

Transendensi bertujuan untuk menambahkan dimensi transendental<sup>45</sup> dalam kebudayaan. Kita harus membersihkan diri dengan

---

<sup>44</sup> Masyarakat Madani merupakan terjemahan dari konsep *Civil Society* yang pertama kali disebutkan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya ketika menghadiri Simposium Nasional dalam rangka Forum Ilmiah pada acara Festival Istiqlal, 26 September 1995 di Jakarta. Dia mengatakan bahwa masyarakat yang ideal adalah kelompok masyarakat yang memiliki peradaban maju. Lebih lanjut Anwar mengatakan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang diasaskan pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Lihat PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah, *Pendidikan Kewargaan (civic education) Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2002), hlm. 140.

<sup>45</sup> Kata kerja *transcend*, yang artinya kata transendental diambil, berasal dari bahasa Latin *transcendere* yang artinya memanjat di/ke atas. Dalam *Webster's New International Dictionary* pengertian transendental yang lebih relevan dalam konteks ini adalah "abstrak, metafisis" dan "melampaui." *Ibid.*, hlm. 34.

mengingat kembali dimensi transendental yang menjadi bagian sah dari fitrah kemanusiaan. Sehingga kita bisa merasakan bahwa dunia ini merupakan rahmat Tuhan. Transendensi merupakan konsep yang diderivikasikan dari *tu'minuna billah* (beriman kepada Allah). Transendensi hendak menjadikan nilai-nilai transendental (keimanan) sebagai bagian penting dari pembangunan peradaban. Transendensi menempatkan nilai-nilai agama pada kedudukan yang sangat sentral dalam politik profetik.

Transendensi adalah dasar dari humanisasi dan liberasi. Transendensi memberi arah kemana dan untuk tujuan apa humanisasi dan liberasi itu dilakukan. Transendensi merupakan barang yang hilang dalam peradaban modern yang dibangun di atas logika dan semangat renaissains. Manusia produk renaissains adalah antroposentris yang merasa menjadi pusat dunia. Melalui proyek rasionalisasi, manusia memproklamirkan diri sebagai penguasa dunia. Di sinilah transendensi dapat berperan penting dalam memberikan makna yang akan mengarahkan tujuan manusia. Islam dapat membawa ke dunia yang sekarat, bukan karena kurang alat atau teknik, akan tetapi karena kekurangan maksud dan tujuan. Nilai-nilai transendental ketuhanan inilah yang akan membimbing manusia menuju nilai-nilai luhur kemanusiaan.

Transendensi dalam Ilmu Politik Profetik di samping berfungsi sebagai dasar nilai bagi praksis humanisasi dan liberasi, juga berfungsi sebagai kritik. Dengan kritik transendensi, kemajuan teknik dapat diarahkan untuk mengabdikan pada perkembangan manusia dan kemanusiaan, bukan pada kehancurannya. Melalui kritik transendensi, masyarakat akan dibebaskan dari kesadaran materialistik di mana posisi ekonomi seseorang menentukan kesadarannya, menuju kesadaran transendental. Transendensi akan menjadi tolok ukur kemajuan dan kemunduran manusia.

## Penutup

Dalam penelitian ini disebutkan bahwa dalam ajaran Islam, istilah kepemimpinan dikenal dengan kata *imamah*, sedangkan kata yang terkait dengan kepemimpinan dan berkonotasi pemimpin dalam Islam ada 7 (tujuh) macam, yaitu: *khalifah, malik, wali, 'amir, ra'in, sultan, rais, serta ulil 'amri*. Politik Profetik terdapat tiga nilai penting yang dijadikan sebagai pijakan atau pijakan yang sekaligus menjadi unsur-unsur yang akan membentuk karakter paradigmatisnya, yaitu; humanisasi, liberasi dan transendensi. Kepemimpinan profetik merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan, dengan pola yang dilaksanakan nabi (*prophet*). Kekuatan kepemimpinan profetik terletak pada kondisi spiritualitas pemimpin. Artinya, seorang pemimpin profetik adalah seorang yang telah selesai memimpin dirinya. Sehingga, upaya mempengaruhi orang lain, merupakan proses *leading by example* atau memimpin dengan keteladanan.

#### Daftar Pustaka

- Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993
- T.M. Hasbie Al-Shiddieqy, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Islam*, Yogyakarta: Matahari Masa, 1969
- Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004<sup>1</sup> Mahmud 'Abd Al-Majid Al-Khalidi, *Pilar-Pilar Sistem Pemerintahan Islam*, cet. ke-2, Bogor: Al Azhar Press, 2013
- Tim Darul Ilmi, *Buku Panduan Lengkap Agama Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Qultum Media, 2010<sup>1</sup> Marzuki Ali, "Nilai-Nilai Kepemimpinan Dalam Ajaran Islam," <http://www.marzukialie.com/upload/arsip/172FATAYAT.pdf>, akses pada 15 Desember 2014. Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2005
- M. Siddiq Purnomo, dkk., *Sketsa Pemikiran Politik Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Politea Press, 2007
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, cet. ke-1, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990
- Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Dudung Abdurrahman, dkk., *Sejarah Peradaban Islam: Dari Masa Klasik Hingga Modern*, cet. ke-4, Yogyakarta: LESFI, 2012
- Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Kalam Mulia, 2006

- Khairudin Yujah Sawiy, *Perebutah Kekuasaan Khalifah (Mengungkap Dinamika dan Sejarah Politik Kaum Sunni)*, cet. ke-2, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2005
- Husyn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, cet. ke-1, (Bandung: PT Rosdakarya, 1995
- Muhammad 'Abid al-Jabiri, *Ad-Di>n Wa ad-Daulah Wa Tahbi>q asy-Syari>'ah*, terj. Mujiburrahman, cet. ke-1, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, cet. Ke-10, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000
- Haidar Barong, *Umar Bin Khattab Dalam Perbincangan (Penafsiran Baru)*, cet. ke-1, (Jakarta: Yayasan Cipta Persada Indonesia, 1994
- Imam As-Suyuthi, *Tharikh Al-Khulafa>' (Ensiklopedi Pemimpin Umat Islam dari Abu Bakar Hingga Mutawakkil)*, cet. ke-1, Jakarta: PT Mizan Publika, 2010
- Raana Bokhari dan Mohammad Seddon, *Ensiklopedia Islam*, ttp: tnp, ttt
- Nadirsah Hawari, "Mencermati Isu Nepotisme Kepemimpinan Utsman Bin 'Affan," dalam *Jurnal TAPIS*, Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, Vol.8 No.1, Tahun 2012
- Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terliabat Pemilu dan Politik*, cet. ke-1, Jakarta: Gozian Press, 2013
- Muhlis, "Islam Masa Khulafaur Rasyidin," <http://muhlis.files.wordpress.com/2007/08/islam-masa-khulafaur-raosyidin.pdf>, akses 14 Desember 2014.
- Taufik Abdullah, dkk., *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, (Khilafah)*, Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve, 2002
- Syed Mahmudunnasir, *Islam, Konsepsi dan Sejarah*, cet. ke-4, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Abbas Mahmud Aqqad, *Keagungan Ali bin Abu Thalib*, cet.ke-3, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994
- Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*, cet. ke-1, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010
- Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan (Konsep Pemerintahan Islam serta Studi Kritis "Kerajaan" Bani Umayyah dan Bani Abbas)*, cet. ke-1, (Bandung: Mizan, 2007
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, edisi ke-5 Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993
- Irhamni H. Rofi'un, *Membumikan Kepemimpinan Profetik*, <http://irhamnirofiun.blogspot.com/2014/04/membumikan-kepemimpinan-profetik.html>, akses 10 Desember 2014.
- Sanerya Hendrawan, *Spiritual Management: From Personal Enlightenment Towards God Corporate Governance*, Bandung: Mizan, 2009
- Hasan Hanafi, dkk., *Islam dan Humanisme (Aktualisasi Humanisme Islam di Tengah Krisis Humanisme Universal)*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

- Baedhowi, *Humanisme Islam (Kajian Terhadap Pemikiran Filosofis Muhammad Arkoun)*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu (Epistemologi, Metodologi, dan Etika)*, edisi kedua, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006
- PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah, *Pendidikan Kewargaan (civic education) Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2002